**BAB II**

**FIGUR DAN PREFERENSI MASYARAKAT**

Bab ini akan membahas kajian pustaka mengenai “Pengaruh Figur Artis terhadap Preferensi Masyarakat pada Pilgub Jabar 2013”. Kajian pustaka ini merupakan dasar teoritis yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat pemahaman, wawasan dan mempertajam analisis mengenai permasalahan yang diteliti agar hasil penelitian yang didapat mampu dianalisis secara ilmiah dan dipaparkan secara sitematis.

1. **Preferensi**

Preferensi merupakan istilah yang sering kita dengar dalam ilmu ekonomi, walaupun begitu istilah preferensi sering juga digunakan dalam ilmu sosial lainnya. Secara singkat preferensi dapat kita artikan sebagai selera. Berbicara mengenai preferensi kita akan dihadapkan dengan adanya banyak perbedaan antar individu karena setiap orang mempunyai kecenderungan sendiri yang tak dapat kita setarakan satu sama lain. Kebanyakan istilah preferensi menyinggung mengenai preferensi konsumen, namun yang akan dijelaskan bukanlah mengenai hal itu. Untuk itu mari kita ketahui lebih lanjut apa arti dari preferensi.

1. **Pengertian Preferensi Pemilih**

Preferensi pemilih menurut Darkam (2009, hlm. 80-81) adalah:

Suatu sikap dalam melaksanakan keputusan politik dalam gerakan demokratisasi pada suatu negara yang sedang menanamkan demokrasi partisipatoris. Oleh karena, ada harapan besar sebagai sebuah dampak sosialisasi dan pendidikan pemilih itu, jika warganegaranya bisa memberikan pilihan politiknya pada pilihan rasional.

Kemudian, pendapat diatas dipertegas oleh Prihatmoko (dalam Darkam, 2009, hlm. 90) bahwa:

Preferensi pemilih warga masyarakat kita itu masih dipengaruhi oleh istilah Feith dan Castle dengan istilah politik aliran, oleh karena itu perilaku memilih masyarakat kita itu masih tradisional yang selalu didasarkan pada ikatan emosional juga dipengaruhi kharisma dan tokoh. Dengan demikian maka semua hal diatas bisa dijadikan sebagai sebuah proses pemilu yang demokratis atau sebaliknya masih jauh dari harapan demokrasi yang digariskan secara normatif.

Dari dua pengertian preferensi pemilih diatas dapat kita simpulkan bahwasannya preferensi pemilih adalah kecenderungan seseorang dalam memilih pemimpin di kehidupan demokrasi. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa setiap orang memilki preferensi yang berbeda-beda untuk memilih pemimpin yang dikehendakinya. Oleh karena itu, sosok pemimpin yang ada harus mampu mewakili berbagai preferensi masyarakat agar menjadi panutan yang baik.

1. **Preferensi dan Persepsi**
2. **Pengertian Persepsi**

Persepsi sering kita artikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu hal. Cara pandang tersebut dapat berupa sesuatu yang positif atau negatif yang berbeda pada setiap orang. Kenapa dikatakan berbeda, karena setiap orang memiliki pengalaman dan pemikiran yang berbeda sehingga persepsi yang dihasilkan pada setiap orang akan berbeda.

Persepsi menurut Walgito (2010, hlm. 102) merupakan "Pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu”. Hal ini sejalan dengan pengertian persepsi menurut Atkinson dan Hilgard yaitu:

Proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Sti­mulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (<http://www.pengertiandefinisi.com/2012/01/pengertianpersepsi.html>.).

Dua pendapat diatas menunjukkan bahwa persepsi terjadi karena adanya proses pengorganisasian stimulus. Stimulus yang ada berasal dari lingkungan sekitar. Adapun pengertian Persepsi menurut Schemerhon (Budiarti, 2005, hlm. 1) adalah “Proses yang terjadi saat orang memilih, menerima, mengorganisasi dan menterjemahkan informasi dari lingkungan”. Sedangkan, persepsi menurut Hanurawan (2012, hlm. 34) adalah “Sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya”. Pengertian lain mengenai persepsi dipaparkan oleh Slameto (2003, hlm. 102) bahwa:

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Dari ketiga pengertian diatas dapat kita simpullkan bahwa persepsi itu merupakan proses menafsirkan informasi yang ada dilingkungan, sehingga terbentuk menjadi cara pandang. Pengertian persepsi yang telah dipaparkan Slameto tadi memiliki kesamaan dengan penjelasan sebelumnya mengenai persepsi. Persepsi dalam penjelasan ini menunjukkan pada hubungan seseorang dengan lingkungannya dengan kata lain lingkungan memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang. Setiap orang tinggal pada lingkungan yang berbeda oleh sebab itu persepsi yang dihasilkan juga berbeda.

1. **Faktor-Faktor yang Menentukan Persepsi**

Berbicara mengenai persepsi tidak lepas dari faktor-faktor yang menentukannya. Rakhmat mengemukakan ada dua faktor yang menentukan persepsi yaitu faktor fungsional dan faktor struktural. Rakhmat (2012, hlm. 54) menjelaskan mengenai faktor fungsional sebagai berikut:

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakterisitik orang yang memberikan respons kepada stimulus itu.

Selanjutnya Rakhmat (2012, hlm. 57) juga menjelaskan mengenai faktor-faktor struktural yaitu:

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt, seperti kohler, Wartheimer (1959, Rakhmat, 2012, hlm. 57), dan Koffka, merumuskan prinsip-prinsip persepsi yang bersifat struktural. Prinsip-prinsip ini kemudian terkenal dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, bila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya.

Dari penjelasan mengenai faktor-faktor persepsi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya faktor fungsional adalah faktor yang mempengaruhi persepsi dari dalam diri orang yang bersangkutan. Sedangkan, faktor struktural adalah faktor yang mempengaruhi persepsi secara keseluruhan.

Selain itu, menurut Rivai dan Deddy (2003, hlm. 236) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (*perceiver*). Yang termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat, pengalaman dan pengharapan individu. Kedua, faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi dimana persepsi itu dilakukan yang meliputi, waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial.

Tiga faktor yang telah dikemukakan oleh Rivai dan Deddy dapat dijelaskan dengan persepsi seseorang dalam memilih pasangan Cagub dan Cawagub pada Pilgub Jawa Barat tahun 2013. Faktor yang pertama berasal dari diri individu masing-masing dalam menentukan sikap untuk memilih salah satu pasangan calon. Faktor kedua berasal dari setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur baik itu latar belakang, visi, misi, program kerja dan lain-lain. Faktor yang terakhir dapat kita artikan dengan keadaan lingkungan sosial dari individu.

1. **Proses Terjadinya Persepsi**

Walgito (2010, hlm. 102) mengemukakan mengenai proses terjadinya persepsi yakni “Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor”. Proses terjadinya persepsi bisa digambarkan dalam skema sebagai berikut.

****

St: stimulus (faktor luar)

Fi: faktor intern (faktor dalam termasuk perhatian)

Sp: struktur pribadi individu

Skema 2.1

Proses Terjadinya Persepsi

(Sumber: Walgito, 2010, hlm. 103)

Lebih lanjut Walgito (2010, hlm. 103) menjelaskan bahwa:

Individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan direspon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan di sini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

Dari skema diatas dapat kita simpulkan bahwasannya individu tidak selamanya merespon semua stimulus, hal itu tergantung oleh perhatian individu itu sendiri untuk memutuskan stimulus mana yang dipilih. Contohnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa barat terdapat lima pasangan calon, lima pasangan calon tersebut memberikan stimulus kepada individu dengan visi misi, iklan politik, kampanye, jargon politik dan sebagainya. Individu yang bersangkutan menerima semua stimulus yang ada, akan tetapi ia hanya memberikan respon kepada satu pasangan calon yang sangat menarik perhatiannya. Hal tersebut dapat menunjukkan proses terjadinya persepsi terhadap individu yang akan memilih pada Pilgub Jawa Barat.

1. **Hubungan Preferensi dan Persepsi**

Preferensi masyarakat dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur dipengaruhi oleh banyak faktor baik itu dari keluarga, teman, lingkungan sekitar dan media. Diantara banyak faktor yang ada, media merupakan sarana yang paling gencar dalam memberikan pengaruh kepada seseorang dalam memilih pemimpin. Hal ini dapat disebabkan oleh fungsi media massa yang digunakan dengan baik dalam kegiatan politik. Media massa menurut Laswell (Tabroni, 2012, hlm. 96) memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pengawasan, fungsi penghubung, dan fungsi warisan sosial.

Media memiliki banyak jenis dan penggemarnya masing-masing. Ada yang menyukai media elektronik dan ada juga yang menyukai media cetak. Graber berpendapat bahwa “Orang yang terdidik lebih memilih koran. Meski begitu, tidak ada yang menyangkal bahwa televisi melengkapi koran sebagai sumber informasi utama untuk berita nasional” (Vivian, 2008, hlm. 567).

Pendapat Graber diatas menjelaskan bahwa orang yang terdidik disana adalah orang-orang yang jeli dan kritis terhadap informasi yang ada. Mereka memilih koran karena berita yang disajikan lugas dan bersifat netral. Meskipun begitu mereka tidak menampik bahwa peran televisi juga besar dalam melengkapi penyajian informasi. Hal ini juga terjadi di Indonesia, dimana ada masyarakat yang menyukai koran, internet, majalah televisi dan media lainnya sebagai sumber informasi. Media yang ada tidak lepas dari pro dan kontra. Pihak yang kontra menganggap media yang ada tidak bersifat netral dan berat sebelah dalam memaparkan informasi.

Bennet (Tabroni, 2012, hlm. 107) memaparkan bahwa “Media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya”. Sifat tidak netral dan berat sebelah terjadi dikarenakan beberapa hal seperti kepentingan sosial, ekonomi, politik, selain itu adanya media televisi yang dimiliki oleh pimpinan partai politik. Alasan tadi dapat membuat persepsi masyarakat mengenai stasiun televisi yang bersangkutan dalam memberikan informasi cenderung tidak netral.

Pihak yang pro berpendapat bahwa media menjadi jembatan dalam memperoleh informasi, khususnya dalam mengetahui sosok yang dicalonkan menjadi kandidat dalam pemilihan umum baik pemilihan kepada daerah, legislatif maupun pemilihan presiden. Ghazali (2011, hlm. 279) memaparkan:

Dikaitkan dengan konteks komunikasi politik di mana media membawa pesan (baca: iklan & kampanye) dalam pemilihan umum dan pemerintahan, maka Akuntabilitas Publik dan Akuntabilitas Profesional seharusnya menjadikan media juga pada saat yang sama memainkan peranan sebagai ”penganalisis atau pembongkar pencitraan kandidat maupun kebijakan”.

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa media harus bisa menjadi penganalisis atau pembongkar pencitraan kandidat maupun kebijakan. Media cetak dan elektronik setidaknya mampu membuat masyarakat mengenal lebih jauh sosok figur yang akan menjadi pemimpin, mereka juga dapat mengetahui visi dan misi yang diusung dalam lima tahun kedepan sehingga tak ada lagi istilah beli kucing dalam karung. Media dalam hal ini memiliki peranan juga dalam membentuk persepsi seseorang dan opini publik mengenai calon kandidat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ghazali bahwa media membawa pesan dalam pemilihan umum, oleh karena itu media harus mampu menyampaikan pesan itu dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat membangkitkan preferensi masyarakat untuk semakin cerdas dalam memilih pemimpinnya.

Selain pengaruh media, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi preferensi pemilih. Dalam hal ini Sitepu (2012, hlm. 184) berpendapat bahwa “Preferensi seseorang pemilih dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografis, dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan dan agama”.

1. **Figur**
2. **Pengertian Figur**

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya figur dapat kita artikan sebagai seorang atau tokoh yang menjadi panutan di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kehidupan politik juga memiliki figur yang dapat mempengaruhi masyarakat khususnya dalam pemilihan. Fuholin (Alie, 2013, hlm. 73) berpendapat bahwa “*Candidate credibility* merupakan salah satu faktor penting dalam *political campaign*”. Kemudian Nursal (Alie, 2013, hlm. 73) mengemukakan bahwa “Kepemimpinan yang kuat akan membentuk sikap seorang pemilih terhadap tokoh tersebut. Kemudian dapat menentukan pilihannya terhadap partai politik”. Selain itu, Arifin (2011, hlm. 236) menerangkan bahwa:

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa pemberian suara dalam pemilihan umum cenderung menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan yang ideal baginya. Citra jabatan ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, keberanian dan sebagainya, serta memiliki “rekam jejak” yang baik dalam perjuangan politik terutama perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan. Karakter kepahlawanan politik itu, juga dipublikasikan oleh media massa atau media sosial, sehingga tercipta citra dan opini publik yang positif baginya dikalangan publik.

Pahlawan politik yang dijelaskan oleh Arifin adalah figur atau tokoh politik yang memiliki citra jabatan yang ideal. Ideal yang dimaksud adalah berupa kriteria kepemimpinan yang baik dan dimiliki seseorang kandidat. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa ketika kriteria tersebut dipublikasikan kepada masyarakat melalui media akan semakin menumbuhkan citra positif, sehingga dapat menyuburkan arti pahlawan politik yang sebenarnya dalam masyarakat.

Pahmi Sy (2010, hlm. 37-39) berpendapat bahwa kepopuleran seorang figur sangat ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kepribadian, tim sukses, visi dan isu-isu politik yang dimainkan dan pembiayaan politik. Mengenai faktor kepribadian Pahmi Sy (2010, hlm. 37) memaparkan bahwa:

Figur yang memiliki kepribadian utuh akan dikagumi dan disukai oleh rakyat kebanyakan. Seperti sosok yang miliki moralitas, kesantunan, kesederhanaan dan tidak arogan akan lebih menyentuh hati rakyat. Disamping itu kepribadian yang mendapat tempat dihati rakyat adalah kepribadian yang memiliki kemampuan intelektualitas, kecerdasan dan etos kerja yang tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kepopuleran seorang figur yang menjadi kandidat Cagub dan Cawagub dapat ditentukan oleh empat faktor diatas meskipun faktor yang terakhir bukan menjadi hal yang penting. Dikatakan tidak penting karena rawan dengan hal yang negatif, maka dari itu tiga faktor sebelumnya harus kuat dan dijaga kebaikannya.

Figur atau tokoh yang ada di masyarakat belum dapat dikatakan figur atau tokoh politik apabila tidak diangkat menjadi figur atau tokoh politik. Pengangkatan tokoh-tokoh politik menurut Gaffar (1989, hlm. 113) adalah:

Suatu transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur, keagamaan, status, kelas dan atas dasar isme-isme kesukuan dan kualifikasi tertentu, yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik.

Pengangkatan tokoh-tokoh politik menurut Gaffar (1989, hlm. 113-114) harus melalui dua proses yaitu:

1. Transformasi dari peranan-peranan non politis kepada suatu situasi dimana mereka menjadi cukup berbobot memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus.
2. Pegangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama ini belum pernah mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup mampu mengemban tugas seperti itu. Proses pengangkatan itu melibatkan baik persyaratan status maupun penyerahan posisi khusus pada mereka.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa setiap anggota masyarakat yang dapat menjadi tokoh politik, asalkan lulus dalam seleksi yang ada agar dapat memasuki sistem politik dan mengenalnya dengan baik dan melalui dua proses yang telah dikemukakan diatas. Dua proses pengangkatan yang harus dilalui calon tokoh-tokoh politik merupakan suatu panduan dalam menjalankan tugas-tugas politik yang akan diembannya kelak.

1. **Pengertian Kepemimpinan**

Figur atau tokoh tidak bisa dilepaskan dengan kepemimpinan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk itu mari kita ketahui lebih jauh arti dari kepemimpinan menurut beberapa ahli. Kepemimpinan menurut Koentjaraningrat (Soekanto, 2006, hlm. 250 ) adalah:

Kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Hoyt (Kartono, 2013, hlm. 57) mengenai kepemimpinan yakni “Seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang”. Hunges dkk (2012, hlm. 6) juga berpendapat bahwa kepemimpinan adalah “Proses mempengaruhi sebuah kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan kelompok”. Dari tiga pendapat yang ada menunjukkan bahwa secara singkat kepemimpinan adalah cara mempengaruhi orang lain dalam hal yang baik dan memiliki tujuan tertentu yang disetujui oleh pihak yang memberi pengaruh dan pihak yang diberi pengaruh.

Kepemimpinan menurut Dubrin (2009, hlm. 4) adalah “Tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan perubahan positif”. Pendapat Dubrin ini memiliki sedikit perbedaan dari pendapat sebelumnya mengenai kepemimpinan karena menjelaskan hasil yang didapat dari kepemimpinan adalah menimbulkan perubahan positif bukan perubahan negatif yang berdampak tidak baik bagi orang lain.

1. **Teori Kepemimpinan**

G.R Terry mengemukakakan (Kartono, 2011, hlm. 71-72) mengemukakan sembilan teori kepemimpinan yaitu: teori otokratis, teori psikologis, teori sosiologis, teori suportif, teori laissez faire*,* teori kelakuan pribadi, teori sifat, teori situasi, teori humanistik/populistik.

1. **Teori Otokratis**

Teori otokratis identik dengan pemerintahan yang otokrat, mengenai teori ini Kartono (2011, hlm. 72) menjelaskan bahwa:

Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, paksaan dan tindakan-tindakan yang arbiter (sebagai wasit) ia melakukan pengawasan ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori ini menjelaskan pemimpin yang memiliki ciri-ciri sangat ketat dalam memimpin, lalu dalam memberikan perintah tidak boleh ada kompromi, sehingga tidak adanya kerjasama dengan anak buah.

1. **Teori Psikologis**

Penjelasan mengenai teori ini yakni:

Teori ini menyatakan, bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik, untuk merangsang kesediaan berkerja dari para pengikut dan anak buah. Pemimpin merangsang bawahan, agar mereka mau bekerja guna mencapai sasaran-sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi tujuan-tujuan pribadi (Kartono 2011, hlm. 74).

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dijelaskan dalam teori ini merupakan kepemimpinan yang bertindak sebagai motivator untuk para pengikut dan anak buah agar tujuan yang dicita-citakan tercapai. Pemimpin seperti ini mampu memperhatikan kebutuhan, keinginan, perasaan dan hal-hal lain dari kejiwaan bawahannya. Hal ini dapat dijadikan cara agar pemimpin dapat mengobarkan semangat bawahannya dalam menjalani pekerjaannya.

1. **Teori Sosiologis**

Kartono (2011, hlm. 75) menjelaskan teori sosiologis yaitu:

Kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar-relasi dalam organisasi; dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya, agar tercapai kerjasama yang baik. Pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dengan menyertakan para pengikut dalam pengambilan keputusan terakhir.

Kepemimpinan berdasarkan teori ini telah ditunjukan oleh pendapat diatas bahwa kepemimpinannya mengedepankan relasi, sehingga apabila terjadi konflik harus diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan agar tidak merusak kerjasama yang ada, selain itu kepemimpinan didasarkan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan agar terjadi kesepakatan yang adil diantara setiap pihak dalam mencapai tujuan.

1. **Teori Suportif**

Berbicara mengenai teori suportif tidak lepas dengan kata *support* yakni adanya dorongan atau sokongan. Kartono (2011, hlm. 75) memaparkan bahwa: “Menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin, dan bekerja dengan penuh gairah, sedang pemimpin akan membimbing dengan sebaik-baiknya melalui *policy* tertentu”.

Teori ini menjelaskan pemimpin yang demokratis, mampu bekerjasama dengan orang lain, penuh semangat, terbuka, membimbing dengan baik dan mampu merangkul para pengikutnya. Dalam pengambilan keputusan pemimpin dan para pengikutnya sama-sama berpartisipasi aktif.

1. **Teori Laissez Faire**

Kartono (2011, hlm. 76) menjelaskan bahwa:

Kepemimpinan laissez faire ditampilkan oleh seorang tokoh “ketua dewan” yang sebenaranya tidak becus mengurus dan dia menyerahkan semua tanggung jawab serta pekerjaan kepada semua anggotanya. Dia adalah seorang “ketua” yang bertindak sebagai simbol, dengan macam-macam hiasan atau ornamen yang mentereng.

Kepemimpinan dalam teori ini menujukkan kepemimpinan yang pasif, acuh dan memberikan semua tanggung jawab kepada bawahan, lalu dalam pengambilan keputusan juga tidak memiliki ketegasan. Kepemimpinan seperti ini kurang terkontrol dari segi pekerjaannya karena peran pemimpin disini telah banyak berubah sehingga membuat yang dipimpinnya dapat berbuat sewenang-wenang.

1. **Teori Kelakuan Pribadi**

Kartono (2011, hlm. 77) menjelaskan bahwa:

Teori ini menyatakan, bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam situasi yang dihadapi. Dengan kata lain, dia harus mampu bersikap fleksibel, luwes, bijaksana, “tahu gelagat”, dan mempunyai daya lenting yang tinggi karena ia harus mampu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk sesuatu masalah. Sedang masalah sosial itu tidak akan pernah identik sama di dalam runtutan waktu yang berbeda.

Teori ini menjelaskan bahwa setiap pemimpin meskipun orangnya berbeda, akan tetapi memiliki kelakuan sama. Sama disini diartikan dengan kemampuan untuk bersikap, seperti dalam pengambilan keputusan harus tepat, lalu mampu memberikan solusi yang baik terhadap masalah yang ada. Setiap pemimpin pasti punya cara sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga tidak dapat disamakan secara keseluruhan, akan tetapi secara pribadi setiap pemimpin memiliki kesamaan dalam memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya.

1. **Teori Sifat**

Rivai dan Deddy (2003, hlm. 7) menjelaskan teori sifat adalah:

Teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik khas (fisik, mental kepribadian) yang dikaitkan dengan keberhasilan kepemimpinan. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa teori ini menjelaskan mengenai karakteristik unik yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin. Karakteristik ini menunjang kepada kesuksesan yang diperoleh pemimpin yang bersangkutan. Kartono (2011, hlm. 77-78) dalam menjelaskan teori ini menambahkan bahwa:

Ada beberapa ciri-ciri unggul sebagai predisposisi yang diharapkan akan dimiliki seorang pemimpin yaitu: memiliki intelegensi tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya persuasif dan keterampilan komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, kreatif, mau memberikan partisipasi sosial yang tinggi, dan lain-lain.

1. **Teori Situasi**

Kartono (2011, hlm. 78) memaparkan mengenai teori situasi yakni:

Teori ini menjelaskan bahwa harus terdapat daya lenting yang tinggi atau luwes pada pemimpin untuk menyesuaikan diri terhadap tuntunan situasi, lingkungan sekitar, dan zamannya. Faktor lingkungan itu harus dijadikan tantangan untuk diatasi.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa teori ini menjelaskan kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi dilingkungan sekitar. Tipe kepemimpinan dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Kartono (2011, hlm. 78) menambahkan bahwa “Teori ini kemudian berkembang menjadi teori situasi personal, yang menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah produk dari situasi/keadaan”.

1. **Teori Humanistik/Populistik.**

Teori humanistik/populistik menurut Kartono (2011, hlm. 79) adalah:

Fungsi kepemimpinan menurut teori ini ialah merealisir kebebasan manusia dan memenuhi sengenap kebutuhan insani, yang dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat. Untuk melakukan hal ini perlu adanya organisasi yang baik dan pemimpin yang baik, yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa teori ini menjelaskan kepemimpinan yang memberi kebebasan dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat dengan adanya interaksi yang baik. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang harmonis dan dekat, sehingga antara rakyat dan pemimpinnya saling memahami satu sama lain, saling berpartisipasi aktif dan adanya keterbukaan anatar pemimpin dan rakyat.

1. **Tipe Kepemimpinan**

Rivai dan Deddy (2003, hlm. 36-37) menjelaskan ada tiga pokok tipe kepemimpinan yaitu tipe kepemimpinan otoriter, tipe kepemimpinan kendali bebas dan tipe kepemimpinan demokratis.

1. **Tipe Kepemimpinan Otoriter**

Pemimpin otoriter terkadang diartikan sebagai pemimpin yang berkuasa sendiri atau pemimpin yang memiliki sifat yang sewenang-wenang. Agar kita tidak salah dalam mengartikan tipe kepemimpinan ini, maka Rivai dan Deddy (2003, hlm. 36) memaparkan bahwa:

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan ditangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa pemimpin tipe ini tidak melibatkan anak buah secara aktif sebagai rekan kerjanya untuk saling bertukar pikiran ataupun memberikan kritik dan saran, sehingga terkesan egois dan tidak demokratis. Padahal pemimpin yang baik sebaiknya tidak bertindak sebagai penguasa tunggal karena sebagai manusia seorang pemimpin memiliki keterbatasan. Kedudukan anak buah sebaiknya tidak sempit sebagai pelaksana saja, karena tidak menutup kemungkinan agar anak buah diberikan kepercayaan penuh dan diawasi oleh pimpinan.

1. **Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas**

Rivai dan Deddy (2003, hlm. 37) menjelaskan bahwa:

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang-orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan ini terlalu memberikan kebebasan kepada yang dipimpin, padahal sebaiknya harus ada kontrol dari pimpinan untuk mengatur orang-orang yang dipimpinnya secara adil. Oleh karena itu, tipe pemimpin seperti ini belum ideal kalau dipraktekan sepenuhnya dalam praktek kepemimpinan karena tidak adanya partisipasi dari pemimpin. Misalnya jika pemimpin tipe ini sepenuhnya ada dalam kehidupan pemerintahan, maka ia akan menyerahkan semua keputusan kepada anak buah dan masyarakat tanpa memberikan penilaian atau tindakan mengenai keputusan tersebut. Hal ini memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pemipinnya tidak tegas dan pasif. Tipe kepemimpinan ini sangat berkaitan dengan teori laissez faire.

1. **Tipe Kepemimpinan Demokratis**

Rivai dan Deddy (2003, hlm. 37) menjelaskan bahwa:

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok/oraganisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dihargai dan disalurkan secara wajar.

Pemimpin tipe ini aktif berpartisipasi dalam membuat keputusan, lalu dalam memberikan kepercayaan kepada anak buah tetap berada dalam kontrol sehingga antara pemimpin dan anak buahnya saling berpartisipasi aktif. Dalam pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis sehingga dihasilkan keputusan bersama yang terbaik dan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam pemerintahan negara, pemimpin dengan tipe demokratis sangat diharapkan karena mampu mengayomi masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

1. **Sifat Pemimpin**

Setiap kepemimpinan diwarnai oleh sifat-sifat unik yang dimiliki oleh setiap figur atau pemimpin. Sifat seseorang tidak sama karena secara lahiriah manusia memang diciptakan berbeda dan sifat-sifat yang ada dalam diri manusia juga bisa terbentuk dari faktor keturunan maupun lingkungan. Dari Sifat-sifat manusia yang beraneka ragam itu harus ditentukan sifat-sifat yang ideal untuk seorang pemimpin. Finer (Kantaprawira, 2004, hlm. 59-60) berpendapat bahwa ada 9 sifat-sifat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni: kesadaran, kebulatan pandangan, ketetapan jiwa, keyakinan, kekreatifan, kepekaan hati nurani, keberanian, kemampuan memukau dan kepandaian.

Selain itu, menurut Herry (2005, hlm. 28) figur terbaik pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi sembilan kriteria yakni:

1. Seorang *Strong Leader.*
2. Dapat dipercaya dan amanah
3. Profesional
4. Berpengalaman di bidang manajerial berskala besar
5. Memiliki integritas diri: jujur dan mampu menjaga martabat
6. Berwawasan kebangsaan
7. Memahami persoalan ekonomi-bisnis lokal, domenstik dan global
8. Memiliki hubungan luas dalam pergaulan nasional
9. Bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Pendapat diatas memiliki perbedaan dalam menentukan sifat-sifat ideal bagi seorang figur atau pemimpin. Meskipun begitu, pada intinya setiap sifat atau kriteria yang dijabarkan para ahli memiliki kesamaan yakni memiliki karakter yang baik, profesional, cerdas dan mampu memberikan solusi. Dari pendapat yang dikemukakan Herry memiliki keunikan tersendiri karena sifat atau kriteria pertama adalah *strong leader.* Mengenai hal tersebut Herry (2005, hlm. 28-29) menjelaskan bahwa:

Pengertian *strong leader* jangan disalah artikan, namun mesti dipahami bahwa seorang pemimpin yang baik memiliki kekuatan lahiriah dan batiniah. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki karakter yang kuat. Dia tidak kasar dalam bersikap, supel, namun mampu membuat keputusan.

*Strong leader* yang dijelaskan diatas bukan sekedar pemimpin yang kuat dalam arti fisik dan psikis karena kuat dalam dua artian tersebut masih kurang apabila tidak ditambah dengan kuatnya karakter yang dimiliki figur atau pemimpin. Karakter pemimpin yang memiliki sifat keibuan atau memiliki sifat seperti seorang ayah cenderung lebih disukai oleh masyarakat dari pada karakter pemimpin yang kasar dan kurang berwibawa. Selain itu, sifat atau karakter pemimpin yang selanjutnya adalah dekat dengan masyarakat dan loyal juga sering menjadi daya tarik seorang pemimpin. Intinya karakter yang melekat dalam diri figur atau tokoh menjadi bahan nomor satu dalam pertimbangan pemilih. Hal ini juga dijelaskan oleh Arifin (2011, hlm. 237) bahwa:

Dalam komunikasi politik, terutama retorika politik atau pidato politik dihadapan massa pada hakikatnya khalayak akan memperhatikan siapa (tokoh politik) ketimbang apa (pesan politik) yang akan disampaikan. Artinya, khalayak akan tertarik bukan pada apa isi pidato, melainkan kepada tokoh politik yang akan tampil berpidato. Hal itu menunjukkan bahwa ketokohan adalah hal yang sangat utama dalam komunikasi politik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Titus (Imawan, 1998, hlm. 23) bahwa “Secara umum ada enam faktor penting untuk memilih seseorang pemimpin: *intellectual capacity, self-significance, viability, training, experience, reputation”*. Mengenai hal ini Imawan (1998, hlm. 23) menjelaskan: ”Keenam faktor ini menentukan persepsi seseorang terhadap masalah sosial yang dihadapi; kemampuan untuk merumuskan secara jelas buah fikiran yang bersifat abstrak; dan stabilita emosional si pemimpin”.

Dari kutipan diatas kita memahami bahwa enam faktor tadi menjadi suatu patokan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin, lalu merupakan penentuan persepsi sehingga akan menghasilkan preferensi yang tepat bagi seorang pemilih.

Faktor pertama yakni *intellectual capacity* dapat diartikan sebagai kapasitas intelektual dimana seorang pemimpin wajib memilikinya karena dapat menjadi penentu kapabilitasnya dan semakin baik akan menjadi contoh bagi masyarakatnya. Faktor kedua yakni *self-significance* dapat diartikan kemampuan untuk meningkatkan diri, seorang pemimpin harus memiliki sikap ini agar selalu menjadi pribadi yang optimis. Faktor ketiga yakni *viability* dapat diartikankelangsungan hidup atau mapan*,* seorang pemimpin yang mapan lebih disukai masyarakat dibandingkan dengan yang belum mapan. Faktor keempat yakni *training* dapat diartikan sebagai pelatihan, seorang pemimpin harus mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik*.* Faktor kelima adalah *experience* yakni pengalaman, seorang pemimpin yang memiliki pengalaman yang banyak dalam berorganisasi atau pengalaman dalam bidang lain memiliki nilai lebih dalam meyakinkan masyarakat. Faktor yang terakhir yakni *reputation* adalah nama baik dimasyarakat, seorang pemimpin yang memiliki nama baik berarti dikenal oleh masyarakat secara pribadi sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk memilih pemimpin tersebut.

 Sifat mengenai pemimpin selanjutnya adalah pemimpin yang karismatik Gaffar (1989, hlm. 121) menjelaskan:

Di negara-negara sedang berkembang pemimpin karismatik mempunyai peranan yang sangat dominan dikalangan masyarakat. Sebagai contoh dapat kita saksikan pemerintahan Nehru, Nasser, Soekarno, dan Ben Gurion yang mampu berdiri tegak diatas perbedaan nilai-nilai budaya masyarakatnya.

Gaffar (1989, hlm. 121) menambahkan bahwa “Pemimpin karismatik tidak semata-mata menyandarkan diri pada pengikut massa yang sifatnya mengambang, tapi mereka juga menjalankan fungsi rekuitmen dan pengerahan tenaga yang intens sekali”. Pemimpin seperti ini sangat disukai masyarakat karena keberadaanya yang dapat merangkul semua kalangan. Lalu dapat menjalankan fungsi peranannya sebagai pemimpin dengan baik. Karisma paling bagus adalah yang seimbang antara karisma dari aura wajah dan karisma dari tindakan yang dilakukan sebagai pemimpin.

1. **Perilaku Pemilih (*Voting Behavior*)**
2. **Pengertian Perilaku Pemilih**

Sebelum membahas tentang perilaku pemilih mari kita bahas terlebih dahulu arti dari perilaku dan pemilih. Perilaku menurut Ndraha (Hikmat, 2011, hlm. 140) adalah “Operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu lingkungan (masyarakat, alam, lingkungan, teknologi atau oraganisasi), sedangkan sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi pendirian”. Arti pemilih menurut Firmanzah (2008, hlm. 87) adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama kontestan untuk dipengaruhi dan diyakini agar kemudian memberikan suaranya.

Gaffar (Alie, 2013, hlm. 53-54) menjelaskan bahwa perilaku pemilih adalah “Keputusan seseorang dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu. Hal ini terjadi baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif”. Pendapat ini relevan dengan pernyataan sebelumnya mengenai pengertian sikap dan pemilih. Kata kunci yang dapat diambil dari pengertian perilaku pemilih menurut Gaffar adalah keputusan.

Setelah kita mengetahui arti dari perilaku dan pemilih barulah kita dapat memahami arti perilaku pemilih. Perilaku pemilih dapat kita artikan sebagai sikap atau perbuatan dari seorang pemilih dalam menentukan pilihannya apakah condong kepada tokoh tertentu, partai tertentu atau sama sekali tidak ingin memilih siapapun dalam pemilihan.

Bagan 2.1

External

Internal

Pembagian Jenis Pemilih

(Sumber: Firmanzah, 2008, hlm. 86)

Dari bagan diatas dapat kita ketahui bahwa jenis pemilih dibagi menjadi dua bagian yakni pada bagian internal adalah konstituen dan pada bagian eksternal adalah non partisan dan konstituen partai lain. Konstituen disini dapat dikatakan masyarakat. Konstituen menurut Firmanzah (2008, hlm. 87) adalah “Kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik”. Adapun masyarakat yang tidak menjadi konstituen salah satu partai politik merupakan pemilih yang termasuk dalam kategori non-partisan karena kelompok ini tidak terikat oleh ideologi partai politik tertentu.

Schumpeter (Firmanzah 2008, hlm. 88) menganalisis mengenai perilaku pemilih dalam pemilu yakni:

Pemilih mendapatkan informasi politik dalam jumlah besar (*overload*) dan beragam, seringkali berasal dari berbagai macam sumber yang sangat mungkin bersifat kontradiktif. Ditengah-tengah informasi yang melimpah ini, pemilih dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit untuk memilah-milah informasi.

Pendapat Schumpeter menjelaskan bahwa masyarakat dihadapi dengan kesulitan dalam memilah dan memilih informasi, oleh karena itu timbulnya dilema apakah pemilih termasuk kategori pemilih rasional atau tidak. Brennaan dan Lomasky serta Fiorina (Firmanzah 2008, hlm. 89) mengemukakan bahwa “Keputusan pemilih selama pemilu adalah perilaku ekspresif. Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku *supporter* yang memberikan dukungannya pada sebuah tim sepak bola”. Mengenai hal tersebut Firmanzah (2008, hlm. 89) memaparkan “Menurut mereka perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi”. Jika semakin loyal seorang pemilih terhadap salah satu partai atau ideologi tertentu yang ada pada suatu partai, maka partai tersebut cenderung dijadikan pilihannya dalam pemilihan umum. Begitu pula kalau yang dipilih masyarakat adalah tokoh politik. Loyalitas ini tumbuh karena kepercayaan pemilih terhadap visi dan misi yang mereka tawarkan.

Ketika membuat keputusan memilih masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Alie menjelaskan (2013, hlm. 57) “Selain faktor demografi, informasi, dan mobilisasi massa karakteristik lainnya yang menjadi faktor dalam keputusan memilih adalah adanya insentif ekonomi”. Niemi (Alie 2013, hlm. 57) menambahkan “Hanya saja kehadiran insentif ekonomi tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki karakteristik keputusan rasional, karena keputusan memilih merupakan keputusan investasi masa depan.” Pemaparan diatas menunjukkan bahwa faktor demografi, informasi dan komunikasi massa lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan pemilih.

1. **Teori-Teori Perilaku Pemilih**

Sitepu (2012, hlm. 183) menjelaskan ada dua teori perilaku pemilih yakni *party identification model* dan *sociological model*. Mengenai teori-teori perilaku pemilih Gaffar (Alie, 2013, hlm. 53-54) menjelaskan bahwa “Terdapat dua pendekatan untuk menganalisis perilaku pemilih: pendekatan sosiologis (dikenal pula dengan mazhab Colombia) dan pendekatan psikologis (dikenal dengan mazhab Michigan)”.Dari kedua pendapat tersebut memiliki kesamaan, oleh karena itu untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut berikut dipaparkan mengenai teori perilaku pemilih.

1. ***Party* *Identification Model***

Sitepu (2012, hlm. 183) menjelaskan bahwa:

Teori perilaku pemilih yang paling awal, adalah *Party* *Identification Model,* adalah teori yang berdasarkan kepada “*sense of psycological*” yang secara psikologis terikat dengan partai politik. Atau identifikasi psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya (seperti identifikasi seorang calon pemilih dari kalangan seorang pedagang kecil misalnya dengan citra Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai wong cilik). Lalu kemudian ada lagi yang namanya identifikasi kelas sosial (*social class identification*) yaitu kesamaan yang dalam pandangan pemilih, ada diantara kedudukan sosial dirinya dan kedudukan sosial partai politik (seperti kelas buruh, dan tani) mengidentifikasikan diri mereka dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu.

Teori ini menjelaskan bahwa kesamaan psikologis dan identifikasi kelas sosial menjadi daya tarik bagi para pemilih. Hal ini mulai terjadi pada masyarakat Indonesia yang sudah berfikir kritis dan rasional. Gaffar (Alie, 2013, hlm. 54) juga menjelaskan pendekatan psikologis adalah:

Keputusan pemilih terhadap partai politik atau kandidat didasarkan respon psikologis, seperti kualitas personal kandidat, performa pemerintah yang saat itu berkuasa, isu-isu yang dikembangkan oleh kandidat, dan loyalitas terhadap partai.

Pendekatan psikologis lebih menjelaskan mengenai perilaku pemilih yang lebih mempertimbangkan kualitas kandidat dari pada latar belakang seperti yang akan dijelaskan dalam analisis pendekatan sosiologis. Pemilih yang membuat keputusan didasarkan respon psikologis lebih bersifat kritis dalam menentukan pilihannya karena sangat teliti dan peka terhadap apa yang menjadi daya tarik dan sesuatu yang berbeda dari figur atau tokoh yang menjadi kandidat.

1. ***Sosiological Model***

Sitepu (2012, hlm. 183) menjelaskan bahwa:

Pendekatan teori dengan berdasarkan perspektif sosiologis, adalah pendekatan yang berasal dari Eropa dan di Amerika Serikat (AS) aliran pemikiran (*school of thought*) ini sangat populer dikalangan sosiologis dan ilmuan politik yang berlatarbelakang pemikiran Eropa. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku pemilih terhadap keanggotaan kelompok mengatakan bahwa pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya dimana ia berada, terutama dalam kelompoknya.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa teori ini berasal dari Amerika dan Eropa, perilaku pemilihnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Hal tersebut membuat pemilih lebih terikat dengan kedua faktor tadi sehingga kurang merespon hal lain yang sebenarnya masih bisa menjadi pertimbangan. Gaffar (Alie, 2013, hlm. 54) memiliki penjelasan lain mengenai pendekatan sosiologis yakni:

Preferensi politik termasuk di dalamnya preferensi pemberian suara di kotak pemilihan merupakan produk dari karakterisitik sosial-ekonomi seperti profesi, kelas sosial, agama dan lainnya. Dengan kata lain, latar belakang seseorang atau kelompok orang seperti jenis kelamin, kelas sosial, ras, etnik, agama, ideologi dan daerah asal merupakan variabel independen yang mempengaruhi keputusan pemilih.

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sosiologis merupakan preferensi pemilih terhadap seorang kandidat dilihat dari segi latar belakang yang dimiliki kandidat. Hal ini masih berkatian dengan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pemilih masih terikat dengan faktor soial ekonomi. Perilaku pemilih seperti ini ada di Indonesia. Contohnya, pemilih yang berasal dari Kecamatan tertentu akan cenderung memilih calon kandidat yang berasal dari Kecamatan yang sama dengan alasan calon kandidat tersebut dapat menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan lebih memahami emosional masyarakat karena tinggal di Kecamatan tersebut. Analisis perilaku pemilih masyarakat Indonesia secara khusus masih didominasi oleh pendekatan sosiologis, karena faktor SARA khususnya masih menjadi pertimbangan dalam masyarakat untuk memilih seorang kandidat termasuk dalam Pilgub Jawa Barat 2013 yang lalu. Setiap calon memperoleh suara yang signifikan di daerah tertentu. Dari hasil perolehan suara Pilgub Jabar 2013 pasangan Yance dan Tatang unggul di Kabupaten Indramayu dan pasangan Rieke dan Teten unggul di Kabupaten Majalengka.

Selain yang telah dikemukakan sebelumnya, ada pendekatan lainnya yang menjelaskan mengenai perilaku pemilih menurut Alie (2013, hlm. 65) yaitu Pertama adalah pendekatan struktural (atau sosiologis). Kedua adalah pendekatan ekologis (atau statistik agregat). Ketiga adalah pendekatan psikologi sosial dan keempat adalah pendekatan rasional-pilihan (*rational choice*).

Penjelasan mengenai Pendekatan pertama yakni pendekatan struktural (atau sosiologis) dan pendekatan ketiga yakni pendekatan psikologi sosial hampir sama dengan penjelasan yang telah dikemukakan diatas mengenai teori *party identification model* dan *sociological model*. Adapun penjelasan pendekatan kedua yakni pendekatan ekologis (atau statistik agregat) menurut Alie (2013, hlm. 65) adalah “Ia lebih banyak menganalisis mengenai hubungan pola pemilih dengan fitur-fitur karakteristik wilayah geografis (daerah pemilihan, konstituensi dan lain-lain)”. Pendekatan yang keempat yakni pendekatan rasional-pilihan (*rational choice*) menurut Alie (2013, hlm. 65) adalah “...hasil dari serangkaian instrumen kalkulasi biaya-keuntungan (*cost-benefit*) oleh individu”. Sebenarnya pendekatan ekologis hampir sama dengan pendekatan sosiologis, sedangkan pendekatan rasional pilihan hampir sama dengan pendekatan psikologis.

1. **Tipe Pemilih**

Nimmo (Arifin, 2011, hlm. 223) menyebutkan ada empat tipe pemilih dalam pemilihan umum yaitu: “(1) tipe rasional, (2) tipe reaktif, (3) tipe responsif, dan (4) tipe aktif”. Tipe Rasional menurut Arifin (2011, hlm. 223) yaitu:

Pemberi suara rasional, yang sesungguhnya merupakan aksional diri, yaitu sikap yang intrinsik pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara pada kebanyakan warga negara.

Mengenai pemilih rasional Nursal (Alie, 2013, hlm. 66) berpendapat bahwa:

Pemilih rasional adalah mereka yang melakukan penilaian secara valid atas tawaran yang disampaikan oleh partai. Selain itu, pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan mendapatkan informasi yang cukup.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa pemilih rasional memilih calon berdasarkan pemikiran logis dan kritis, bukan karena terpengaruh atau didesak oleh pihak manapun. Pemilih rasional memiliki persiapan yang khusus dalam memilih agar keputusan yang dia buat sesuai dengan apa yang telah ia telaah pada partai atau calon yang ditawarkan dalam pemilihan. Ciri-ciri pemilih rasional menurut Nursal (Alie, 2013, hlm. 67) adalah:

1. Keputusan yang dihadapkan pada berbagai alternatif;
2. Dapat dibandingkan;
3. Alternatif disusun secara trasitif, seperti A lebih disukai dari pada C dan seterusnya;
4. Memilih alternatif berdasarkan tingkat preferensi yang lebih tinggi; dan
5. Konsisten, artinya kepurusan yang akan diambil sama bila dihadapkan pada alternatif yang sama.

Ciri-ciri pemilih rasional menunjukkan bahwa pemilih rasional memiliki sifat yang konsisten dalam memilih sehingga tidak ada keraguan dari dalam dirinya untuk tidak memberikan pilihan. Pemilih rasional sesuai telaahnya telah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari calon atau partai yang ditawarkan dalam pemilihan.

Pemilih dengan tipe reaktif menurut Arifin (2011, hlm. 224) adalah “Pemberian suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional kepada partai sebagai sumber utama aksi-diri dan pemberi suara yang reaktif”. Pemilih tipe ini sangat loyal dengan partai politik yang sudah menjadi acuannya. Ia sangat mengetahui dengan baik citra partai politik yang disukainya.

Selanjutnya pemilih dengan tipe responsif menurut Arifin (2011, hlm. 224) adalah “Pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, peristiwa politik dan kondisi-kondisi sesaat”. Pemilih tipe ini ada yang memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi saat pemberian suara tidak pasti memberikan suara pada partai yang ia suka sehingga pemilih responsif mudah terpengaruh dengan hal lain yang ada saat sebelum pemilihan umum.

Pemilih tipe aktif menurut Arifin (2011, hlm. 224) adalah “Pemberi suara yang terlibat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, dan personalitas, dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan yang diberikan”. Pemilih tipe ini terlibat langsung dan menerima segala pilihan yang ditawarkan dalam memilih tidak didasarkan loyalitas terhadap partai atau hal lainnya sehingga menurut hemat penulis pemilih tipe ini mendekati tipe pemilih rasional meskipun tidak utuh.

Tipe pemilih lainnya yaitu tipe transaksional menurut Arifin (2011, hlm. 224-225) adalah :

Individu-individu yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi, berdasarkan “transaksi”, berupa “hadiah” atau “fasilitas”. Meskipun simpatisan atau anggota dalam suatu partai, ia dapat memilih kandidat dari partai lain, berdasarkan transaksi yang dikenal sebagai aplikasi dari “politik uang” (*money politics*) yang berlangsung dalam “pasar gelap” (*black market*) politik.

Tipe pemilih seperti ini tidak dipungkiri keberadaannya menjadi rahasia umum dalam kehidupan masyarakat. Pemilih transaksional mencari untung dari keadaan ini, ada yang setia dengan perjanjian yang telah dibuat dan ada juga yang dengan sengaja melanggar karena tergiur dengan tawaran lain yang lebih menguntungkan. Pemilih seperti ini bisa terjadi di kalangan menengah keatas dan menengah kebawah, tergantung pembuat transaksi menaburkan benihnya dimana.

Pemilih menurut Firmanzah (2008, hlm. 120-124) ada empat jenis yaitu: pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Dari pendapat ini ada tiga jenis pemilih yang berbeda dengan pemaparan sebelumnya. Firmanzah (2008, hlm. 120) menjelaskan pemilih kritis adalah:

Perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah ‘*rational voter*’ untuk berpaling ke partai lain*.*

Pemaparan diatas menunjukkan pemilih kritis mengedepankan hal yang bersifat ideologis dari pada hal lainnya seperti program kerja dan citra. Pemilih seperti ini teliti dalam keterkaitan ideologi dengan program kerja, sehingga memiliki ide yang segar untuk dapat digunakan oleh partai yang bersangkutan. Pemilih tipe kritis hampir sama dengan pemilih tipe aktif seperti yang telah dikemukakan diawal.

Pemilih tradisional menurut Firmanzah (2008, hlm. 123) yaitu:

Memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik.

Pemilih tipe ini terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pemilih tradisional lebih melihat sosok figur atau tokoh yang dicalonkan, ia tidak terlalu peduli dengan kebijakan seperti pemilih kritis. Pemilih tipe tradisional di masa lalu mendominasi di Indonesia akan tetapi saat ini pemilih tradisional lambat laun mendekati pemilih kritis.

Jenis pemilih yang terakhir adalah pemilih skeptis. Firmanzah (2008, hlm. 124) menjelaskan bahwa pemimpin skeptis adalah:

Pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali.

Pemilih skeptis bersifat kurang peduli atau acuh terhadap siapa yang terpilih dalam pemilihan umum. Golongan putih (Golput) yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pemilih skeptis karena sifat apatis mereka terhadap partai politik, pemilihan umum, bahkan pemerintahan. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena tindakan yang dilakukan pemilih skeptis dapat berakibat fatal bagi stabilitas nasional karena mereka sama sekali tidak berpartisipasi dalam pemilihan, sehingga sangat merugikan kepentingan bersama.

1. **Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pemilih**

Firmanzah (2008, hlm. 117-118) memaparkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pemilih. Faktor pertama adalah lingkungan, faktor kedua adalah media massa, dan faktor yang ketiga adalah partai politik dan kontestannya.

Faktor lingkungan dapat berupa keluarga maupun lingkungan sekitar. Keluarga menjadi tempat pertama seorang individu berinteraksi, sehingga dalam memilih pemimpin terkadang anggota keluarga saling mempengaruhi satu sama lain untuk memilih calon A, B, dan seterusnya. Lingkungan sekitar juga memberikan pengaruh yang sama, misalkan seseorang yang tinggal di lingkungan yang loyal terhadap salah satu partai tertentu terkadang akan memilih partai atau kandidatnya dalam pemilihan.

Faktor kedua yakni media massa, Firmanzah (2008, hlm. 117) menjelaskan bahwa “Kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi merupakan kekuatan untuk pembentukan opini publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang diberikan kepada masyarakat”. Hal ini relevan dengan keadaan yang terjadi pada Pilgub Jawa Barat 2013. Berbagai media massa saling memaparkan opini publik mengenai elektabilitas, popularitas, prestasi, pengalaman dan hal lainnya mengenai Cagub dan Cawagub. Meskipun informasi yang disajikan banyak, masyarakat yang jeli tidak mengambil semua informasi yang ada dikarenakan informasinya terkadang menjadi bias. Bias disini disebabkan oleh media yang menyajikan informasi dengan tidak netral.

Faktor yang ketiga mempengaruhi pemilih adalah partai politik dan kontestannya. Pemilih selalu memperhatikan segi citra partai dan calonnya di masyarakat, lalu visi misi, latar belakang, prestasi dan lain lain.

Ketiga faktor tesebut saling mempengaruhi satu sama lain, akan tetapi kembali lagi kepada diri pemilih sendiri dalam memberikan keputusannya. Apakah dipengaruhi oleh salah satu faktor atau tidak. Mengenai ini Firmanzah (2008, hlm. 118) menambahkan bahwa “Ketiga hal diatas akan mempengaruhi *‘judgement’* pemilih tentang kedekatan dan ketertarikan terhadap suatu partai politik*”.*

1. **Masyarakat**
2. **Pengertian Masyarakat**

Masyarakat memiliki banyak definisi yang berbeda dari setiap pakar. Disini akan dibahas pengertian masyarakat menurut beberapa pakar sosiologi. Diantaranya adalah J.L. Gillin dan J.P Gillin (Setiadi dan Usman, 2011, hlm. 35) berpendapat bahwa masyarakat adalah “Kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama”. Selanjutnya Soemardjan (Setiadi dan Usman, 2011, hlm. 36) menjelaskan masyarakat adalah “Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan”.

Dua pendapat diatas memiliki pengertian yang hampir sama mengenai masyarakat. Pendapat J.L. Gillin dan J.P Gillin lebih menekankan kepada perasaan persatuan yang dimiliki masyarakat, sedangkan pendapat dari Soemardjan menekankan kebudayaan sebagai hasilnya. Selanjutnya, Comte (Soekanto, 1983, hlm. 15) menyatakan bahwa:

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Manusia diikat didalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang serta merta dan kebutuhannya.

Pendapat diatas memiliki pengertian berbeda mengenai masyarakat. Masyarakat bebas berkembang akan tetapi tetap berada dalam ikatan kehidupan kelompok, sehingga dapat diartikan bahwa setiap orang dalam kelompok itu hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Dapat kita simpulkan dari ketiga pengertian diatas bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tempat tinggal, kesamaan tujuan dan terikat dengan budaya yang sama.

1. **Tipologi Masyarakat**

 Menurut tipologinya masyarakat dibagi kedalam dua bagian yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Agar lebih jelas lagi, mari kita ketahui arti dari masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat desa menurut para ahli sosiologi (Setiadi dan Usman, 2011, hlm. 837-838) adalah:

Ahli sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa “sebagai unit sosial“, yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu, yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat, dan mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai secara bersama.

Masyarakat desa memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki profesi yang homogen seperti menjadi petani sawah atau ladang. Masyarakatnya menjunjung tinggi gotong royong sehingga saling mengenal satu sama lain. Masyarakat desa sangat kekeluargaan, memegang teguh nilai agama dan adat istiadat.

Masyarakat perkotaan menurut Setiadi dan Usman (2011, hlm. 854) adalah “Kehidupan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan”. Masyarakat kota memiliki ciri-ciri yang berlawanan dengan masyarakat desa. Masyarakat kota memiliki profesi yang heterogen, begitu pula dengan asal daerah yang tak sama. Masyarakat kota bersifat individual, sehingga kurang akrab satu sama lain. Masyarakat kota memegang teguh nilai agama, akan tetapi dari segi adat istiadat sudah mulai memudar.

1. **Masyarakat Majemuk**

Berbicara mengenai masyarakat majemuk, Indonesia merupakan salah satunya. Masyarakat yang tinggal heterogen dari segi profesi, suku, asal daerah, agama dan lain sebagainya. Agar lebih memahami apa itu masyarakat majemuk, mari kita ketahui terlebih dahulu artinya. Furnivall (Nasikun, 2010, hlm. 35) menjelaskan bahwa masyarakat majemuk adalah ”Suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik”.

Pendapat yang dikemukakan Furnivall lebih menggambarkan masyarakat indonesia yang majemuk dimasa lalu. Oleh karena itu, Nasikun (2010, hlm. 40) memiliki pendapat lain mengenai pengertian masyarakat majemuk yaitu “Suatu masyarakat adalah bersifat majemuk secara struktural memiliki sub-subkebudayaan yang bersivat *diverse*”. *Diverse* bisa diartikan beraneka ragam, masyarakat Indonesia memiliki sub-subkebudayaan yang beranekaragam baik itu bahasa, suku bangsa, kesenian dan lain sebagainya. Keanekaragaman yang ada terkadang menjadi bahan terjadinya konflik dikarenakan ego setiap pihak.

Sifat-sifat dasar masyarakat majemuk menurut van den Berghe (Nasikun, 2010, hlm. 40-41) adalah:

1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain; (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh diatas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain.

Sifat-sifat tersebut ada dalam masyarakat Indonesia. Sifat yang paling terlihat menonjol adalah sifat pertama yakni pada perbedaan suku bangsa dan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Kemudian, sifat yang kedua ditunjukkan oleh adanya struktur sosial seperti ketua adat dan pemerintahan adat. Terakhir adalah sifat ketiga dimana banyak terjadi konflik antar umat beragama, antar suku, kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Masyarakat majemuk disatu sisi menjadi keuntungan karena kaya akan budaya, akan tetapi ketika tidak terkontrol dengan baik masyarakat majemuk akan lebih rentan terhadap konflik yang besar.

1. **Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan teori yang telah dijelaskan, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2007) yang berjudul “Perilaku Pemilih dalam Pemilu Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah Kabupaten Bandung 2004.” Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa orientasi pemilih pada pemilu 2004 didasari oleh hubungan yang erat antara pemilih dengan elite politik dan bukan didasari dengan pertimbangan rasional. Hal yang paling pertama dalam mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya adalah figur dan ketokohan. Disisi lain media massa juga memberikan peranan yang besar dalam membentuk persepsi masyarakat.

Penelitian kedua adalah survei *Exit poll* Pilkada Jawa Timur pada bulan Mei 2008 yang dipaparkan Alie (2013: 205) bahwa dari 67 persen responden memilih pasangan gubernur karena yakin akan kemampuan mereka. Selanjutnya, responden sebanyak 80,4 persen memilih karena tertarik kepada sosok calon gubernurnya. Survei ini menunjukkan faktor ketokohan sangat berpengaruh dalam pemilihan sehingga, faktor lainnya seperti asal partai politik, ideologi, latar belakang sosial, ekonomi kurang menjadi pengaruh dalam pemilihan.

Penelitian ketiga adalah survei yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)yang dipaparkan dalam sebuah artikel di www.inilah.com pada tanggal 19 November 2012. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa survei yang dilakukan untuk melihat persepsi publik Jabar terhadap hajatan Pilkada. Survei ini dilaksanakan pada tanggal 12-16 November 2012 dengan 1200 responden menghasilkan data sebagai berikut. Pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar mendapat urutan pertama, kemudian pasangan Dede Yusuf-Lex Laksamana di urutan kedua. Diurutan ketiga ada pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki. Urutan keempat ada pasangan Irianto MS-Tatang Farhanul Hakim dan diurutan terakhir ada Dikdik Mulyana Arif Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib. Selain itu dari sisi popularitas dan kesukaan calon gubernur hasil survei menyatakan Dede Yusuf unggul, diurutan kedua ditempati oleh Rieke. Lalu diurutan ketiga ada Aher. Kemudian diurutan keempat Yance dan Dikdik pada urutan terakhir. Adapun hasil survei mengenai popularitas wagub pada urutan pertama ditempati oleh Deddy Mizwar. Urutan kedua ditempati Teten Masduki. Urutan ketiga ada Lex Laksmana, kemudian Tatang dan urutan terakhir ditempati oleh Cecep.

Penelitian keempat adalah survei yang dilakukan oleh [pusat kajian dan kepakaran statistika Universitas Padjajaran (UNPAD). Survei ini dilakukan pada tanggal 11-17 Februari 2013 ini didapat bahwa pasangan Dede Yusuf dan Lex Laksamana unggul dalam elektabilitas](http://www.unpad.ac.id/2013/02/hasil-survei-ke-3-pilkada-jabar-2013-oleh-pusat-kajian-dan-kepakaran-statistika-unpad/) dengan perolehan sebanyak 33,44% dari 2313 responden. Hasil selanjutnya 29,30% diperoleh pasangan Aher dan Deddy, 22,81% diperoleh pasangan Rieke dan Teten, 13,36% diperoleh pasangan Yance dan Tatang, terakhir 1,09% diperoleh pasangan Dikdik dan Cecep.

1. **Hipotesis**

Hipotesis sudah kita kenal dengan arti jawaban sementara yang didapat dari rumusan masalah penelitian. Adapun pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2012: 64) merupakan:

Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Dari pernyataan diatas, dalam penelitian ini penulis memiliki hipotesis yang akan diteliti sebagai berikut:

1. H0: Tidak terdapat pengaruh figur artis terhadap preferensi politik masyarakat Kota Bandung.
2. Ha: Terdapat pengaruh figur artis terhadap preferensi politik masyarakat Kota Bandung.
3. H0: Tidak terdapat hubungan antara popularitas figur artis terhadap preferensi politik masyarakat Kota Bandung dalam Pilgub Jabar 2013.
4. Ha: Terdapat hubungan antara popularitas figur artis terhadap preferensi politik masyarakat Kota Bandung dalam Pilgub Jabar 2013.